

PENGARUH KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PARTIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Khairunnisa karimah¹, Lola Syahirah kamila², Irma Pramudhita³, Eko Purwanto⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2024

Revised Desember 2024

Accepted Desember 2024

Available online Desember 2024

khairunnisakarimah189@gmail.com

ail.com¹,

lolask885@gmail.com²,

pramudhita633@gmail.com³



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstract. *This study aims to analyze the influence of local government communication on community participation in development. Effective communication is considered a key factor in improving community understanding of policies, development projects, and increasing their participation in the decision-making process. Through qualitative analysis, this study explores various communication channels used by local governments, such as social media, government websites, and local media, and their impact on community engagement. The results show that open and transparent communication can strengthen public trust, facilitate greater participation, and improve the quality of policy implementation. However, challenges such as information gaps, limited resources, and cultural barriers can hinder this process. Therefore, this study recommends that local governments improve the accessibility of information and use more localized communication strategies to increase community engagement more effectively in development.*

Keywords: Local Government Communication, Community Participation, Development, Transparency, Social Media, Community Engagement, Public Policy

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh komunikasi pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Komunikasi yang efektif dianggap sebagai faktor utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, proyek pembangunan, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai saluran komunikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah, seperti media sosial, situs web pemerintah, serta media lokal, dan dampaknya terhadap keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan transparan dapat memperkuat kepercayaan publik, memfasilitasi partisipasi yang lebih besar, dan memperbaiki kualitas implementasi kebijakan. Namun, tantangan seperti kesenjangan informasi, keterbatasan sumber daya, dan hambatan budaya dapat menghambat proses ini. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan aksesibilitas informasi dan menggunakan strategi komunikasi yang lebih terlokalisasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih efektif dalam pembangunan.

Kata Kunci: Komunikasi Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, Transparansi, Media Sosial, Keterlibatan Masyarakat, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Komunikasi pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan pembangunan serta memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi yang baik tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pemerintahan lokal, yang berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk mencapai tujuan organisasi, komunikasi harus disesuaikan dengan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, dengan strategi komunikasi yang efektif dalam mengelola informasi untuk membangun reputasi pemerintah dan melibatkan masyarakat (Aries 2024).

Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi pemerintah berperan dalam membentuk agenda dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam komunikasi kebijakan adalah ketidakseimbangan informasi, di mana masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan (Howlett 2022). Oleh karena itu, komunikasi pemerintah harus memastikan bahwa informasi yang jelas dan transparan tersedia untuk masyarakat, serta menyediakan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan agar suara mereka didengar dan dipertimbangkan.

Namun, dalam pelaksanaan komunikasi pemerintah daerah, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti kesenjangan digital dan kurangnya interaksi dengan masyarakat. Strategi komunikasi yang efektif harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan platform digital, serta memperhatikan audiens muda yang lebih aktif di dunia digital (Zhang 2024). Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah perlu memperluas saluran komunikasi yang digunakan, meningkatkan akses terhadap teknologi, dan menyederhanakan cara berkomunikasi agar semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, dapat ikut serta dalam pembangunan dan kebijakan yang diterapkan.

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan karena mempengaruhi keberhasilan dan inklusivitas hasil yang dicapai. Dengan melibatkan komunitas lokal, inisiatif pembangunan dapat lebih selaras dengan kebutuhan dan harapan mereka, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. Keterlibatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi serta mengatasi masalah yang dihadapi (Nisa 2024). Selain itu, partisipasi yang inklusif juga mendukung kesetaraan sosial, dengan memastikan suara kelompok yang terpinggirkan dapat didengar dan mencegah ketidakadilan dalam proses Pembangunan (Ghufron and Agustina 2024).

Beberapa faktor dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kepemimpinan yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi, dengan menunjukkan keterbukaan dan otentisitas yang mendorong warga untuk lebih terlibat (Taurista and Choiriyah 2024). Komunikasi yang jelas dan transparan antara pemerintah lokal dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi, dengan menyediakan saluran umpan balik yang memungkinkan masyarakat memberikan

masukannya yang konstruktif (Taurista and Choiriyah 2024). Selain itu, latar belakang pendidikan masyarakat turut mempengaruhi pemahaman mereka terhadap proses pembangunan dan seberapa besar keterlibatan mereka dalam proses tersebut (Taurista and Choiriyah 2024).

Namun, ada beberapa tantangan yang dapat menghalangi partisipasi yang efektif. Keterbatasan sumber daya, baik berupa dana maupun dukungan kelembagaan, sering kali menjadi hambatan utama dalam upaya melibatkan masyarakat secara maksimal (- 2024). Selain itu, hambatan budaya seperti perbedaan sikap dan bahasa juga bisa menghambat partisipasi, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih spesifik untuk mengatasinya (- 2024). Oleh karena itu, meskipun partisipasi masyarakat sangat penting bagi pembangunan yang sukses, penting untuk menyadari adanya faktor kontekstual dan ketidaksetaraan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil pembangunan yang benar-benar inklusif.

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan. Komunikasi yang baik dapat memperkuat pemahaman, membangun kepercayaan, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, yang pada akhirnya menghasilkan proyek pembangunan yang lebih inklusif dan sukses. Misalnya, di Desa Wedoroklurak, komunikasi yang efektif terbukti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan infrastruktur (Taurista and Choiriyah 2024). Pilihan saluran komunikasi yang tepat juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi. Di Kabupaten Laikipia, Kenya, penggunaan saluran komunikasi yang jelas dan langsung meningkatkan pemahaman masyarakat serta keterlibatan mereka dalam inisiatif pembangunan (Wambugu, Gichuhi, and Ndung'u 2024). Namun, hambatan seperti kurangnya informasi dapat menghalangi partisipasi yang lebih luas, seperti yang terlihat di Nepal, di mana mobilisasi sosial digunakan untuk mengurangi kesenjangan informasi dan mendorong keterlibatan masyarakat (Guragain 2024).

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan strategi yang menekankan transparansi dan inklusivitas, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini terbukti dapat meningkatkan kinerja dan partisipasi dalam pelayanan publik, seperti yang terlihat dalam studi tata kelola desa (Prayitno 2024). Selain itu, kampanye dan lokakarya pendidikan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses tata kelola, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk lebih terlibat (Guragain 2024). Meskipun komunikasi yang baik sangat penting, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kebijakan yang tidak sejalan, dan dinamika politik lokal dapat tetap menghambat partisipasi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif, yang mencakup perbaikan komunikasi, pengembangan kapasitas, dan promosi inklusivitas, diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut (Prayitno 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk memahami pengaruh komunikasi pemerintah daerah terhadap keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggabungkan berbagai sudut pandang teoretis dan hasil empiris dari sumber yang terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan dokumen internasional. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri

literatur yang relevan melalui basis data akademik, seperti Google Scholar, JSTOR, PubMed, dan ProQuest. Kriteria pemilihan literatur mencakup relevansi dengan topik komunikasi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, publikasi yang tidak lebih dari lima tahun terakhir untuk menjaga keakuratan informasi, serta sifat ilmiah, seperti jurnal terindeks atau laporan resmi lembaga internasional. Selain itu, dokumen tambahan dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional, seperti UNDP dan OECD, juga menjadi sumber data untuk melihat praktik komunikasi dalam konteks pembangunan.

Proses analisis dilakukan dengan metode analisis isi kualitatif, meliputi penyaringan data, pengelompokan berdasarkan tema, dan interpretasi hasil. Tema utama yang diidentifikasi mencakup efektivitas komunikasi, media yang digunakan, serta dampaknya terhadap tingkat keterlibatan masyarakat. Penafsiran hasil penelitian dilakukan dengan mengacu pada teori komunikasi organisasi dan teori partisipasi masyarakat. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber, sementara kredibilitas penelitian dipastikan dengan menggunakan sumber yang dapat dipercaya. Penelitian ini juga mematuhi etika akademik dengan memberikan pengakuan terhadap setiap sumber yang dirujuk. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antara komunikasi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam mendukung pembangunan.

PEMBAHASAN

Aksesibilitas informasi yang disediakan oleh otoritas lokal bervariasi secara signifikan antara wilayah dan struktur tata kelola yang ada. Meskipun ada kerangka hukum yang dirancang untuk mendukung transparansi, kepatuhan terhadap peraturan tersebut dan akses publik terhadap informasi sering kali tidak konsisten. Di Rumania, meskipun Undang-Undang No. 544 tahun 2001 mewajibkan pengungkapan informasi secara online, banyak otoritas lokal, terutama di wilayah pedesaan, yang tidak sepenuhnya mematuhi peraturan tersebut, dengan tingkat kepatuhan yang rendah (BULĂU-OLARU, RANTA, and STĂNICĂ 2024). Di Spanyol, Proyek Infoparticipa menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah, terutama di kotamadya kecil, hanya mempublikasikan informasi terbatas, mencerminkan kesenjangan antara ekspektasi hukum dan praktik yang ada (Molina Rodríguez-Navas and Rodríguez Breijo 2020). Beberapa faktor yang mempengaruhi aksesibilitas informasi ini termasuk penerapan prinsip transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas yang sering kali terhambat oleh praktik tata kelola lokal yang kurang memadai (Zhezhko 2024).

Keterbatasan dalam aksesibilitas informasi dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik dan mengurangi partisipasi dalam proses demokrasi. Ketidaktersediaan informasi yang mudah diakses dapat menurunkan kepercayaan warga terhadap pemerintah dan mengurangi partisipasi mereka dalam kegiatan pemerintahan lokal, yang akhirnya mempengaruhi akuntabilitas pemerintah (Rofi Wahanisa et al. 2023)(Molina Rodríguez-Navas and Rodríguez Breijo 2020). Namun, beberapa daerah telah berhasil meningkatkan akses publik terhadap informasi melalui langkah-langkah yang tepat, yang menunjukkan bahwa perbaikan dapat dicapai dengan penerapan kerangka kerja tata kelola yang baik dan strategi keterlibatan

masyarakat yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam hal transparansi, dengan pendekatan yang tepat, aksesibilitas informasi dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi dalam pemerintahan.

Tingkat transparansi dalam penyampaian kebijakan pembangunan dan pengelolaan anggaran memainkan peran kunci dalam meningkatkan akuntabilitas serta membangun kepercayaan publik. Dalam hal pengembangan kebijakan, Framework Transparansi Pengembangan (DTF) menggabungkan informasi wacana dengan dokumentasi alur kerja, yang membantu para pemangku kepentingan memahami dasar dari kebijakan yang diambil (Herzog 2017). Penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan cenderung lebih menghargai representasi wacana yang jelas, asalkan informasi yang kompleks dapat disederhanakan dengan tepat (Herzog 2017). Di sisi lain, di Uzbekistan, penerapan sistem anggaran terbuka bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, mengatasi kesenjangan yang ada (Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'gli 2022). Selain itu, reformasi indikator kinerja dalam program anggaran diperlukan agar penggunaan dana publik dapat disampaikan secara lebih efektif, yang berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabiliti (Basit et al. 2022).

Meningkatnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat meningkatkan kepercayaan investor, yang sangat penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (Jobst 2018). Penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi yang lebih tinggi dapat mengurangi siklus anggaran yang dipengaruhi oleh politik, sehingga menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih stabil (Purwanto et al. 2020). Namun, meskipun transparansi dianggap bermanfaat, beberapa pihak berpendapat bahwa transparansi yang berlebihan dapat menyebabkan kelebihan informasi yang justru menyulitkan proses pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, menyeimbangkan transparansi dengan kejelasan tetap menjadi tantangan dalam kebijakan pembangunan dan pengelolaan anggaran.

Komunikasi yang efektif sangat berperan dalam mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan, berfungsi sebagai penghubung antara pemangku kepentingan dan masyarakat. Komunikasi ini memberikan pengetahuan yang diperlukan bagi warga untuk menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta memberdayakan mereka untuk berkontribusi lebih dalam kemajuan komunitas mereka (Odoom 2020). Ketika masyarakat terlibat dalam komunikasi pembangunan, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga merasa memiliki inisiatif tersebut, yang memperkuat rasa tanggung jawab mereka (Adedokun, Adeyemo, and Olorunsola 2010). Komunikasi yang efektif juga membantu agen pembangunan untuk lebih memahami perspektif lokal, yang sangat penting dalam penerapan perubahan yang sukses (Moemeka n.d.).

Pendekatan partisipatif dalam komunikasi pembangunan menekankan pentingnya inklusivitas dan keterlibatan masyarakat untuk mencapai perubahan sosial dan kesetaraan (Custodio and Bernadas 2022). Media komunitas memainkan peran kunci dalam memfasilitasi komunikasi partisipatif, memberikan kesempatan bagi warga untuk berperan dalam pembuatan pesan dan proses perubahan sosial (Marí Sáez 2013). Namun, tantangannya adalah bahwa banyak individu, terutama di daerah pedesaan, masih kesulitan untuk terlibat karena kurangnya

pemahaman tentang prinsip-prinsip komunikasi pembangunan, yang dapat menghalangi partisipasi mereka dalam pembangunan (Odoom 2020).

Hubungan antara kepercayaan pada pemerintah dan tingkat partisipasi politik memiliki dinamika yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun kepercayaan pada pemerintah seringkali dikaitkan dengan partisipasi seperti pemungutan suara atau penandatanganan petisi, efeknya tidak selalu sama untuk semua bentuk partisipasi. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan dapat meningkatkan partisipasi dalam beberapa aktivitas, hal itu dapat berdampak negatif terhadap partisipasi dalam demonstrasi (Lee and Schachter 2019). Di tingkat pemerintahan lokal, rendahnya tingkat kepercayaan sering kali mengurangi partisipasi, terutama ketika komunikasi yang buruk dan kurangnya informasi mengenai peluang partisipasi menghambat keterlibatan warga (Šaparnienė, Reinholde, and Rinkevičienė 2021).

Selain kepercayaan, faktor sosioekonomi dan pengalaman pribadi juga memainkan peran besar dalam menentukan tingkat partisipasi. Di Amerika Latin, misalnya, faktor seperti status sosial dan pengalaman dengan masalah sosial seperti kejahatan lebih berpengaruh terhadap partisipasi daripada kepercayaan terhadap pemerintah (Pecorari and Cuesta 2023). Sementara itu, meskipun e-partisipasi dapat meningkatkan kepercayaan pada pemerintah, dampaknya seringkali tidak langsung dan bergantung pada sejauh mana warga merasa puas dengan proses tersebut (Xin, Esembe, and Chen 2023). Di sisi lain, ada pandangan yang menyatakan bahwa kepercayaan yang tinggi pada pemerintah bisa menyebabkan kepuasan diri dan mengurangi partisipasi aktif, yang menunjukkan pentingnya pendidikan kritis bagi warga untuk menjaga kesehatan demokrasi.

Media memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran publik tentang inisiatif pembangunan pemerintah. Di Negara Bagian Lagos, Nigeria, misalnya, liputan media memiliki dampak besar pada persepsi masyarakat dan tingkat keterlibatan mereka dalam proyek-proyek pemerintah (Ojewale 2013). Sejarah juga menunjukkan bagaimana media, seperti radio dan televisi di India, digunakan untuk tujuan pendidikan dan mendorong perubahan sosial melalui komunikasi pembangunan (Windah et al. 2022). Saat ini, media sosial berfungsi sebagai alat penting bagi pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan warga dan meningkatkan transparansi, memungkinkan komunikasi langsung dan umpan balik waktu nyata yang memperkuat prinsip keterbukaan dalam pemerintahan (Leocadia 2022).

Selain itu, pendekatan komunikasi yang lebih terfokus pada konteks lokal dapat meningkatkan relevansi dan dampak pesan pembangunan, memastikan bahwa pesan tersebut resonan dengan kebutuhan spesifik komunitas (Leocadia 2022). Media komunitas, seperti radio lokal, juga berperan dalam menjangkau kelompok masyarakat yang lebih terpencil, memaksimalkan penyebaran informasi tentang proyek pembangunan (Ojewale 2013). Namun, meskipun peran media dalam pembangunan seringkali bersifat positif, media juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda atau informasi yang menyesatkan, yang menggarisbawahi pentingnya keterlibatan kritis dengan konten media guna memastikan bahwa informasi yang diterima benar-benar bermanfaat bagi kepentingan publik (Ojewale 2013).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dan proyek pembangunan, serta mendorong keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi informasi yang diberikan pemerintah, baik melalui media sosial, situs web pemerintah, maupun media lokal, berperan penting dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti kurangnya informasi, keterbatasan sumber daya, dan hambatan budaya yang perlu diatasi agar partisipasi masyarakat dapat lebih inklusif dan efektif.

Keberhasilan komunikasi pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual, seperti kepemimpinan yang terbuka, pemilihan saluran komunikasi yang tepat, dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang lebih berfokus pada kebutuhan dan keinginan komunitas lokal sangat diperlukan untuk mencapai dampak yang lebih besar. Dengan memperbaiki strategi komunikasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi, pemerintah daerah dapat memperkuat partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

- , Koh Han Wen Kelvin. 2024. "Enhancing Sustainable Development Through Community Engagement." *International Journal For Multidisciplinary Research* 6(4). doi: 10.36948/ijfmr.2024.v06i04.25621.
- Adedokun, Mary Olufunke, Comfort Wuraola Adeyemo, and Edith Oluwafunmilola Olorunsola. 2010. "The Impact of Communication on Community Development." *Journal of Communication* 1(2):101–5. doi: 10.1080/0976691X.2010.11884775.
- Aries, Aries. 2024. "Strategic Communication of Local Government." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 12(1):216–27. doi: 10.30656/lontar.v12i1.8216.
- Basit, Abdul, Eko Purwanto, Agus Kristian, Dewi Intan Pratiwi, Krismira, Intan Mardiana, and Gusri Weni Saputri. 2022. "Teknologi Komunikasi Smartphone Pada Interaksi Sosial." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10(1):1–12. doi: 10.30656/lontar.v10i1.3254.
- BULĂU-OLARU, Ioana Gabriela, Ana Elena RANTA, and Viorel Ion STĂNICĂ. 2024. "Citizens' Free Access to Information. The Case of Local Institutions from Rural Areas of the North-Western Region from Romania." *Transylvanian Review of Administrative Sciences* (73 E):52–74. doi: 10.24193/tras.73E.4.
- Custodio, Pamela A., and Jan Michael Alexandre C. Bernadas. 2022. "Development Communication." Pp. 1–6 in *The International Encyclopedia of Health Communication*. Wiley.
- Ghufron, Akhmad, and Isna Fitria Agustina. 2024. "Community Engagement in Development Planning in Jabon District." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 15(3). doi: 10.21070/ijccd.v15i3.1128.
- Guragain, Govinda Prasad. 2024. "Community Engagement in Local Governance." *Kutumbha Vani* 5(1):51–60. doi: 10.3126/kv.v5i1.70888.

- Herzog, Bodo. 2017. "Does Transparency Mitigate the Political Budget Cycle?" *Journal of Economic Studies* 44(5):666–89. doi: 10.1108/JES-07-2016-0132.
- Howlett, Michael. 2022. "Information as a Policy Tool." Pp. 345–55 in *The Routledge Handbook of Policy Tools*. London: Routledge.
- Jobst, Andreas A. 2018. "How Transparency Can Contribute to Development." *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.3304349.
- Lee, Yunsoo, and Hindy Lauer Schachter. 2019. "Exploring the Relationship between Trust in Government and Citizen Participation." *International Journal of Public Administration* 42(5):405–16. doi: 10.1080/01900692.2018.1465956.
- Leocadia, Diaz Romero. 2022. "The Use of Social Media by Local Governments." Pp. 482–98 in *Research Anthology on Citizen Engagement and Activism for Social Change*. IGI Global.
- Marí Sáez, Víctor Manuel. 2013. "Participatory Communication for Development in Practice: The Case of Community Media." *Development in Practice* 23(4):549–61. doi: 10.1080/09614524.2013.790941.
- Moemeka, Andrew A. n.d. "DEVELOPMENT COMMUNICATION FOR DEVELOPING SOCIETIES Facing The Realities."
- Molina Rodríguez-Navas, Pedro, and Vanessa Rodríguez Breijo. 2020. "Assessment of the Transparency of Spanish Local Public Administrations: Methodology and Results." Pp. 703–15 in .
- Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'gli. 2022. "A NEW OPEN BUDGET SYSTEM IN UZBEKISTAN TO ENSURE TRANSPARENCY IN THE BUDGET SYSTEM." *EPRA International Journal of Economics, Business and Management Studies* 49–53. doi: 10.36713/epra9615.
- Nisa, Gina De. 2024. "Community Participation in Village Development Planning: A Comparative Study In Bakambat And Cindai Alus Villages." *Journal of Transformative Governance and Social Justice* 2(1):25–41. doi: 10.26905/j-tragos.v2i1.11240.
- Odoom, Daniel. 2020. "Understanding Development Communication: A Review of Selected Literature." *E-Journal of Humanities, Arts and Social Sciences* 37–48. doi: 10.38159/ehass.2020055.
- Ojewale, O. O. 2013. "Media Influence in Awareness Creation for Government Development Projects in Lagos State." *International Journal of Development and Sustainability* 2(2):1280–99.
- Pecorari, Natalia, and Jose Cuesta. 2023. *Citizen Participation and Political Trust in Latin America and the Caribbean: A Machine Learning Approach*. The World Bank.
- Prayitno, Arief. 2024. "LOCAL POLITICAL COMMUNICATION STRATEGY IN IMPROVING VILLAGE PUBLIC SERVICE PERFORMANCE." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 9(3):333–42. doi: 10.24198/jwp.v9i3.56844.
- Purwanto, Eko, Sumardjo Sumardjo, Retno Hafsari, and Cahyono Tri Wibowo. 2020. "Communication Patterns in the Development of Life Skills at the Darul Fallah Islamic Boarding School in Bogor Regency." *Nyimak: Journal of Communication* 4(2):267. doi: 10.31000/nyimak.v4i2.2875.

- Rofi Wahanisa, Benny Riyanto, Septhian Eka Adiyatma, Uche Nnawulezi, and Muhammad Abdul Rouf. 2023. "Achieving Public Information Transparency in The Dissemination of Local Regulations." *Yuridika* 38(3):635–64. doi: 10.20473/yjdk.v38i3.48345.
- Šaparnienė, Diana, Iveta Reinholde, and Sandra Rinkevičienė. 2021. "Relationship Between Citizens' Trust in Local Government and Participation in Local Governance." *Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration* 29(2). doi: 10.46585/sp29021210.
- Taurista, Hafni, and Ilmi Usrotin Choiriyah. 2024. "Community Participation in Development Planning Is Driven by Leadership, Communication, and Education." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 15(3). doi: 10.21070/ijccd.v15i3.1080.
- Wambugu, John, David Gichuhi, and Kahura Ndung'u. 2024. "Influence of Modes of Communication on Public Participation in Laikipia County, Kenya." *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478) 13(6):464–70. doi: 10.20525/ijrbs.v13i6.3612.
- Windah, Andi, Haryanto Hasan, Tina Kartika, and Ida Nurhaida. 2022. "Empirical Study of the Dynamics Contribution of Public Communication Based on Local Wisdom to Development." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10(2):84–91. doi: 10.30656/lontar.v10i2.5604.
- Xin, Ge, Elna E. Esembe, and Jia Chen. 2023. "The Mixed Effects of E-participation on the Dynamic of Trust in Government: Evidence from Cameroon." *Australian Journal of Public Administration* 82(1):69–95. doi: 10.1111/1467-8500.12569.
- Zhang, Yingyao. 2024. "Policy Information Communication in Shanghai's 15-Minute Community Living Circle--Taking Jing'an District as an Example." *Interdisciplinary Humanities and Communication Studies* 1(9). doi: 10.61173/8508hx48.
- Zhezhko, T. 2024. "CONCEPT, FEATURES AND PECULIARITIES OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS." *Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law* 2024(3):7–22. doi: 10.32755/sjlaw.2024.03.007.
- , Koh Han Wen Kelvin. 2024. "Enhancing Sustainable Development Through Community Engagement." *International Journal For Multidisciplinary Research* 6(4). doi: 10.36948/ijfmr.2024.v06i04.25621.
- Adedokun, Mary Olufunke, Comfort Wuraola Adeyemo, and Edith Oluwafunmilola Olorunsola. 2010. "The Impact of Communication on Community Development." *Journal of Communication* 1(2):101–5. doi: 10.1080/0976691X.2010.11884775.
- Aries, Aries. 2024. "Strategic Communication of Local Government." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 12(1):216–27. doi: 10.30656/lontar.v12i1.8216.
- Basit, Abdul, Eko Purwanto, Agus Kristian, Dewi Intan Pratiwi, Krismira, Intan Mardiana, and Gusri Weni Saputri. 2022. "Teknologi Komunikasi Smartphone Pada Interaksi Sosial." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10(1):1–12. doi: 10.30656/lontar.v10i1.3254.
- BULĂU-OLARU, Ioana Gabriela, Ana Elena RANTA, and Viorel Ion STĂNICĂ. 2024. "Citizens' Free Access to Information. The Case of Local Institutions from Rural Areas of the North-Western Region from Romania." *Transylvanian Review of Administrative Sciences* (73 E):52–74. doi: 10.24193/tras.73E.4.

- Custodio, Pamela A., and Jan Michael Alexandre C. Bernadas. 2022. "Development Communication." Pp. 1–6 in *The International Encyclopedia of Health Communication*. Wiley.
- Ghufron, Akhmad, and Isna Fitria Agustina. 2024. "Community Engagement in Development Planning in Jabon District." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 15(3). doi: 10.21070/ijccd.v15i3.1128.
- Guragain, Govinda Prasad. 2024. "Community Engagement in Local Governance." *Kutumbha Vani* 5(1):51–60. doi: 10.3126/kv.v5i1.70888.
- Herzog, Bodo. 2017. "Does Transparency Mitigate the Political Budget Cycle?" *Journal of Economic Studies* 44(5):666–89. doi: 10.1108/JES-07-2016-0132.
- Howlett, Michael. 2022. "Information as a Policy Tool." Pp. 345–55 in *The Routledge Handbook of Policy Tools*. London: Routledge.
- Jobst, Andreas A. 2018. "How Transparency Can Contribute to Development." *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.3304349.
- Lee, Yunsoo, and Hindy Lauer Schachter. 2019. "Exploring the Relationship between Trust in Government and Citizen Participation." *International Journal of Public Administration* 42(5):405–16. doi: 10.1080/01900692.2018.1465956.
- Leocadia, Diaz Romero. 2022. "The Use of Social Media by Local Governments." Pp. 482–98 in *Research Anthology on Citizen Engagement and Activism for Social Change*. IGI Global.
- Marí Sáez, Víctor Manuel. 2013. "Participatory Communication for Development in Practice: The Case of Community Media." *Development in Practice* 23(4):549–61. doi: 10.1080/09614524.2013.790941.
- Moemeka, Andrew A. n.d. "DEVELOPMENT COMMUNICATION FOR DEVELOPING SOCIETIES Facing The Realities."
- Molina Rodríguez-Navas, Pedro, and Vanessa Rodríguez Breijo. 2020. "Assessment of the Transparency of Spanish Local Public Administrations: Methodology and Results." Pp. 703–15 in.
- Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'gli. 2022. "A NEW OPEN BUDGET SYSTEM IN UZBEKISTAN TO ENSURE TRANSPARENCY IN THE BUDGET SYSTEM." *EPRA International Journal of Economics, Business and Management Studies* 49–53. doi: 10.36713/epra9615.
- Nisa, Gina De. 2024. "Community Participation in Village Development Planning: A Comparative Study In Bakambat And Cindai Alus Villages." *Journal of Transformative Governance and Social Justice* 2(1):25–41. doi: 10.26905/j-tragos.v2i1.11240.
- Odoom, Daniel. 2020. "Understanding Development Communication: A Review of Selected Literature." *E-Journal of Humanities, Arts and Social Sciences* 37–48. doi: 10.38159/ehass.2020055.
- Ojewale, O. O. 2013. "Media Influence in Awareness Creation for Government Development Projects in Lagos State." *International Journal of Development and Sustainability* 2(2):1280–99.
- Pecorari, Natalia, and Jose Cuesta. 2023. *Citizen Participation and Political Trust in Latin America and the Caribbean: A Machine Learning Approach*. The World Bank.

- Prayitno, Arief. 2024. "LOCAL POLITICAL COMMUNICATION STRATEGY IN IMPROVING VILLAGE PUBLIC SERVICE PERFORMANCE." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 9(3):333–42. doi: 10.24198/jwp.v9i3.56844.
- Purwanto, Eko, Sumardjo Sumardjo, Retno Hafsari, and Cahyono Tri Wibowo. 2020. "Communication Patterns in the Development of Life Skills at the Darul Fallah Islamic Boarding School in Bogor Regency." *Nyimak: Journal of Communication* 4(2):267. doi: 10.31000/nyimak.v4i2.2875.
- Rofi Wahanisa, Benny Riyanto, Septhian Eka Adiyatma, Uche Nnawulezi, and Muhammad Abdul Rouf. 2023. "Achieving Public Information Transparency in The Dissemination of Local Regulations." *Yuridika* 38(3):635–64. doi: 10.20473/ydk.v38i3.48345.
- Šaparnienė, Diana, Iveta Reinholde, and Sandra Rinkevičienė. 2021. "Relationship Between Citizens' Trust in Local Government and Participation in Local Governance." *Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration* 29(2). doi: 10.46585/sp29021210.
- Taurista, Hafni, and Ilmi Usrotin Choiriyah. 2024. "Community Participation in Development Planning Is Driven by Leadership, Communication, and Education." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 15(3). doi: 10.21070/ijccd.v15i3.1080.
- Wambugu, John, David Gichuhi, and Kahura Ndung'u. 2024. "Influence of Modes of Communication on Public Participation in Laikipia County, Kenya." *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478) 13(6):464–70. doi: 10.20525/ijrbs.v13i6.3612.
- Windah, Andi, Haryanto Hasan, Tina Kartika, and Ida Nurhaida. 2022. "Empirical Study of the Dynamics Contribution of Public Communication Based on Local Wisdom to Development." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10(2):84–91. doi: 10.30656/lontar.v10i2.5604.
- Xin, Ge, Elna E. Esembe, and Jia Chen. 2023. "The Mixed Effects of E-participation on the Dynamic of Trust in Government: Evidence from Cameroon." *Australian Journal of Public Administration* 82(1):69–95. doi: 10.1111/1467-8500.12569.
- Zhang, Yingyao. 2024. "Policy Information Communication in Shanghai's 15-Minute Community Living Circle--Taking Jing'an District as an Example." *Interdisciplinary Humanities and Communication Studies* 1(9). doi: 10.61173/8508hx48.
- Zhezhko, T. 2024. "CONCEPT, FEATURES AND PECULIARITIES OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS." *Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law* 2024(3):7–22. doi: 10.32755/sjlaw.2024.03.007.